



## Ancam Bekukan Keuangan Parpol

**SANGGAU, TRIBUN** - Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sanggau, Antonius mengancam akan membekukan keuangan partai politik (Parpol) yang tak patuh terhadap laporan surat pertanggungjawaban (SPj). Ia mengakui, semua Parpol sudah melaporkan, namun belum melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan.

"Secara keseluruhan mereka sudah membuat SPj, hanya saja laporan mereka itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Contoh, seperti bukti-bukti perjalanan keluar daerah yang tidak mereka lampirkan, seperti tiket dan lain sebagainya. Begitu juga belanja, misalnya tidak ada kwitansi belanja," tegasnya, pada

Selasa (28/2).

Antonius menjelaskan, SPj memang harus disampaikan paling lambat sebulan setelah tahun anggaran berakhir. Pedoman pelaporan SPj, dijelaskan juga sudah ada aturan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014.

Sebagai tindak lanjut itu, dirinya sudah memanggil beberapa Parpol untuk segera melengkapi berkas yang kurang. "Sudah ada beberapa Parpol yang masih juga terdapat kekurangannya. Meskipun, mereka sudah membuat SPj, dan kami pun dipanggil BPK diminta agar dilengkapi berkas yang kurang," jelasnya.

Antonius pun menegaskan bahwa akan ada kon-

sekuensi jika kelengkapan berkas tidak diindahkan. "Kalau tidak lengkap, konsekuensinya mereka harus mengembalikan uang itu dan tahun depan tidak dapat lagi bantuan keuangan partai," tegasnya.

Namun, Antonius masih enggan membeberkan Parpol mana saja yang belum melengkapi berkas tersebut. "Intinya semua partai sudah membuat laporan pertanggungjawaban, hanya saja yang jadi kendala kita itu bukti-buktinya," katanya.

Atas persoalan ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sanggau, Jumadi menegaskan komitmen partainya untuk tertib administrasi. Laporan itu dijelaskan sudah selesai dan tidak ada masalah.

"Bantuan yang PDIP per-

oleh kalau tidak salah Rp 173 juta. Untuk penerima bantuan pun ada hitungannya tergantung perolehan kursi," ujar Ketua DPRD Sanggau itu.

Jumadi juga berharap, agar semua Parpol membuat laporan SPj bantuan Parpol. Untuk itu, ia juga mengingatkan partai yang belum melengkapi laporan untuk segera mengurus.

Ketua DPD II Partai Golkar Sanggau, Fransiskus Ason juga menjelaskan bahwa laporan SPj sudah diurus oleh Sekretariat Golkar Sanggau.

"Untuk pertanggungjawaban sudah kita buat, tapi kalau ada yang kurang seperti yang disampaikan Kepala Kesbangpolinmas itu, nanti tentu akan kita lengkapi sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sanggau itu menegaskan, setiap Parpol wajib membuat laporan SPj. Ia mengingatkan partai yang belum melengkapi laporan untuk segera mengurus.

"Ini perintah UU, jadi jangan diabaikan. Kalau untuk Golkar saya kontrol terus apa-apa saja yang kurang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai semua," harapnya. **(hen)**